



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

**Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur**



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022, rencana kerja tahun berjalan tahun 2023, capaian renstra, analisis kinerja pelayanan DPMTSP, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam pencapaian kinerja dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 untuk Tahun Anggaran 2023.

Manggar, 28 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST

NIP 19750821 200212 1 005



Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP	 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra.....	1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023.....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
 BAB IV PENUTUP	 1



Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP	 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra.....	1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023.....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
 BAB IV PENUTUP	 1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 yang mengampu urusan penanaman modal merupakan perubahan dari rencana kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 yang mengampu urusan Penanaman modal, perdagangan dan perindustrian, sesuai dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, urusan penanaman modal diampu oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur sedangkan urusan perdagangan dan perindustrian diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Perangkat Daerah dan memenuhi amanat Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur sampai dengan triwulan II untuk urusan Penanaman modal yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian perubahan susunan perangkat daerah pada tahun 2023.



Perubahan ini juga dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1): Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi; a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagai Instansi Daerah yang menangani Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar berupa urusan Penanaman Modal berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Lampiran VI) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) kemudian menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan renja perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan kedua-duanya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2008 Nomor 85);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2012 Nomor 17);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114)
26. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20), dan;
27. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 31).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Perubahan Dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

2. Tujuan

Dokumen Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan II tahun 2023 merupakan evaluasi pelaksanaan dari renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur. Evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Hasil evaluasi Renja ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023.

Data capaian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur diambil berdasarkan data capaian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur sampai dengan triwulan II Tahun 2023 seperti yang tergambar pada Tabel 2.1 memperlihatkan capaian rata-rata kinerja fisik sebesar 52,57 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 38,16% dari keseluruhan pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar urusan penanaman modal dan urusan pilihan perdagangan dan perindustrian yang dijabarkan melalui 13 Program dan 21 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan, dengan jumlah anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp 13.474.648.296,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan kedua sebesar Rp 5.141.300.804,-. Sedangkan khusus untuk anggaran urusan penanaman modal pada tahun 2023 sebesar Rp 961.197.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 142.676.229,-

Masih rendahnya capaian kinerja dan capaian realisasi keuangan dikarenakan adanya perubahan pada sebagian besar pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (baik di bidang Penanaman Modal, maupun Bidang Industri Kecil dan Menengah yang masih merupakan bagian dari dokumen rencana kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timursampai denganbulan September 2023)

Berikut hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur pada masa berjalan tahun 2023 sampai dengan triwulan dua tahun 2023.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (a-b)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (p-t) yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang direvisi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
		Semua Bidang															
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	60,00	40.974.176.720	70,00	-	73	6.216.401.336	632.708.517	2.107.165.500	-	2.730.864.017	0,00%	44,07%		
			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	NAH		0,00		0				-		0,00%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang sesuai sesuai standar (Persen)	0,00	05.000,000	0,00	-	100	5.322.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	16,00	05.000,000	0,00	-	4	5.322.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	500,00	75.885.200.000	0,00	-	100	4.347.136.806	100	470.225.819	100	1.001.217.814	100,00%	49,48%		



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITANG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (%)	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (p-1) yang diakulasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diakulasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	154,00	35.895.206,360	0,00	-	36	4.347.126,696	36	470.226.819	36	1.891.317,814	18	1.151.544,533	48,61%	49,49%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparat yang berkinerja baik (Persen)	365,00	696.377,660	0,00	-	77	26.100,560	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Akibat Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakelan Dinas berserta Akibat Kelengkapan (Paket)	0,00	340.777,000	0,00	-	1	4.400,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	265.500,000	0,00	-	10	24.700,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penuhuan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	425,00	4.208.550,870	0,00	-	82,5	704.501,000	60	80.535,861	71	156.360,448	131	248.896,307	118,02%	35,32%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	134.986,500	0,00	-	12	19.104,500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Perakitan dan Peralengkapan Kantor	*Jumlah Paket Perakitan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	501.616,000	0,00	-	12	119.648,000	3	11.251,000	3	-	6	11.251,000	50,00%	9,40%
		Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	225.088,000	0,00	-	9	41.673,500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	173.515,000	0,00	-	12	40.372,000	3	9.099,500	3	5.286,500	6	14.369,000	50,00%	35,57%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	412.396,870	0,00	-	12	72.875,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	37.380,000	0,00	-	3	6.360,000	3	812,000	3	768,000	2	1.280,000	50,00%	20,13%



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITONG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (%2)	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (p-1) yang diakui	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diakui (2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11-12/2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	25.728,000	0,00	-	8	4.468.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	2.700.000,000	0,00	-	76	400.000,000	26	71.713,361	27	150.392,946	58	222.006,367	73,68%	55,50%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertiban Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Pemer)	500,00	2.637.750,000	0,00	-	55	124.485,000	-	-	48	15.073,800	48	15.073,800	57,55%	12,11%
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	1.650.000,000	0,00	-	1	60.200,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	987.750,000	0,00	-	13	64.291,000	-	-	1	15.073,800	1	15.073,800	7,69%	23,40%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertiban penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Pemer)	442,00	3.798.421,362	0,00	-	85	676.095,000	85	62.458.137	85	229.865,043	85	292.344.177	120,01%	43,19%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	1.176.120,000	0,00	-	12	157.867,500	3	14.832,000	3	64.917,500	6	79.730,500	50,00%	50,51%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	681.683,850	0,00	-	4	192.820,000	1	21.382.137	1	46.700,040	2	68.142,177	50,00%	35,34%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.941.387,500	0,00	-	12	326.257,500	3	26.258,000	3	116.207,933	6	144.462,500	50,00%	44,28%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertiban Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Pemer)	466,00	2.731.897,500	0,00	-	92	328.915,000	02	7.486,700	92	24.516,400	92	32.005,100	100,00%	9,73%



2023

Predikat



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITANG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Sektor	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (R-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (R-1) yang diakuisisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diakuisisi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11-12(R-1)R-2	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITANG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (R-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (R-1) yang diakuisisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diakuisisi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berakademi nasional yang menandatangani investasinya (Investor)	22,05	2.870.155,000	16,00	-	19	546.437,000	2.380,000	-	42.016,229	3	45.306,229	15,78%	8,31%	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	persentase keputusan investor terhadap kewajiban penyempulan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (persen)	164,05	2.870.155,000	0,00	-	7,5	546.437,000	-	2.380,000	8	42.016,229	8	45.306,229	100,00%	8,31%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)	0,00	688,000,000	0,00	-	10	103.637,200	7	2.380,000	-	10,710,000	7	13.580,000	70,00%	11,53%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	0,00	1.667.155,000	0,00	-	200	274.988,200	-	-	108	32.306,229	108	32.306,229	54,00%	11,73%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)	0,00	1.115.000,000	0,00	-	50	187,811,600	-	-	3	-	3	-	6,00%	0,00%
									</								



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (%Q)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (p-1) yang diakuisisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diakuisisi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11+12/100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Mengoptimalkan Tata Kelola, Kebijakan Internal dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Penertiban data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal diakuisi berdasarkan sektor usaha (Persen)	100,00	300.000.000	54,95	-	63,54	46.361.000	2.380.000	-	10.710.000	-	50	13.060.000	78,57%	38,23%
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase kelengkapan data dan informasi perizinan dan non perizinan (persen)	451,40	300.000.000	0,00	-	90	46.361.000	80	2.380.000	-	10.710.000	-	13.060.000	2,00%	38,23%
		Pengolahan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik yang Didaki, Dilaji dan Derasaskan (Dokumentasi)	0,00	300.000.000	0,00	-	12	46.361.000	2	2.380.000	3	10.710.000	5	13.060.000	41,57%	38,23%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		41,57%	38,23%
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Akan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Wilayah Usaha	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Penertiban pengembangan dan pengalokasian sarana distribusi perdagangan (Persen)	100,00	41.830.000.000	100,00	-	100	1.389.618.000	78.647.790	-	300.701.368	-	384.349.118	0,00%	27,56%	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITANG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Rencana		Realisasi Capaian Kinerja Rencana sampai dengan Renja Tahun 2022 (R-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (R-1) yang diakuisisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diakuisisi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8				12		13-12/100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengembangan Ekonomi																
		Pembangunan dan Pengalihan Sarana Distribusi Perdagangan	cakupan pembangunan/pengembangan dan pengalihan sarana prasarana distribusi perdagangan (persen)	500,00	41.800.000,000	0,00	-	100	1.399.018,000	-	70.647,750	-	305.701,388	-	394.349,118	0,00%	27,06%
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0,00	37.000.000,000	0,00	-	2	267.750,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Fasilitas Pengalihan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitas Pengalihan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0,00	4.800.000,000	0,00	-	4	1.121.868,000	4	70.647,750	4	305.701,388	2	394.349,118	50,00%	34,26%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		40,37%	27,06%
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Akut Kebutuhan Sarana dan Prasarana Wilayah Untuk Pengembangan Ekonomi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (Preser)	2,99	5.551.500,000	3,79	-	3,59	1.638.868,500		6.724,500		1.528.790,750	5	1.535.615,250	147,08%	33,69%
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kecukupan stok (stocking) barang Pokok dan Barang Penting (Hari)	485,30	150.000,000	0,00	-	75	31.741,500	-	-	14	2.280,000	14	2.200,000	16,57%	9,33%



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Sektor	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (%)	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (≥1) yang diakuisisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diakuisisi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6	7		8				9		10-12/100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	0,00	150.000,000	0,00	-	4	31.741.000	1	-	1	2.250.000	2	2.200.000	50,00% 4,93%
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kebupaten/Kota	penurunan selisih harga sesuai bahan pokok strategis terhadap harga rata-rata nasional (persen)	350,00	5.300.000,000	0,00	-	60	1.000.987.500	-	4.724.000	-	1.505.690.750	-	1.033.315,250	0,00% 95,77%
		Pemeriksaan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pemeriksaan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	0,00	200.000,000	0,00	-	15	72.960,000	3	3.964.500	3	17.000,000	6	21.004,500	40,00% 28,80%
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	5.160.000,000	0,00	-	1	1.027.587,500	-	2.760.000	1	1.509.530,750	1	1.512.290,750	100,00% 99,97%
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio penerima pupuk terhadap RDKK (Persen)	4,00	51.500,000	0,00	-	0,76	6.140,000	-	-	-	-	-	-	0,00% 0,00%
		Pengawasan Penyuluhan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyuluhan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0,00	51.500,000	0,00	-	4	6.140,000	-	-	-	-	-	-	0,00% 0,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														95,98%	93,09%	
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITONG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (%)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (p-1) yang diakuisisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diakuisisi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		
				5		6		7		8		9		12		13=12/a*100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor (Produk)	2,00	225.000.000	1,00	-	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Mini Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas promosi produk unggulan ekspor (pelaku usaha)	20,00	225.000.000	0,00	-	3	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	*Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina (Pelaku Usaha)	0,00	225.000.000	0,00	-	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0,00%	0,00%	
										Prediksi Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP bertanda tanda sah yang berlaku (Persen)	74,00		54,75		72,5						46		63,37%		
			Persentase kepatuhan BOKT yang diawasi terhadap kepatuhan yang berlaku (Persen)	76,00	4.985.000.000	70,00	-	72	238.956.250		1.290.000		90.177.100		15.407.100		0,00%	4,77%
		Pelaksanaan Metode Legal Berapa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	UTPP bertanda tanda sah (UTPP)	4500,00		0,00		805		581		8		8		0,01%		
			pelaku usaha yang melakukan pelanggaran metode legal (usaha)	21,00	4.985.000.000	0,00	-	5	238.956.250	-	1.290.000	-	90.177.100	-	15.407.100		0,00%	4,77%



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITANG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (%Q)	Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (≥1) yang diakuisisi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diakuisisi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
				5		6		7		8		9		10	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyusunan dan Penyalpahan Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyusunan dan Penyalpahan Industri (Dokumen)	0,00	270.000,000	0,00	-	4	7.400,900	-	-	2	-	50,00%	0,00%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	0,00	3.000.000,000	0,00	-	4	66.400,900	-	-	2	11.570,500	50,00%	17,43%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Pemasaran Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Pemasaran Industri (Dokumen)	0,00	5.562.500,000	0,00	-	4	18.020,000	-	-	2	-	50,00%	0,00%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemasaran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemasaran Serta Masyarakat (Dokumen)	0,00	3.522.500,000	0,00	-	4	2.818.510,000	1	3.010,000	1	270.370,000	50,00%	10,00%
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0,00	313.000,000	0,00	-	12	35.301,100	3	2.465,000	3	11.047,000	50,00%	38,18%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	
														50,00%	10,47%
														Prediksi Kinerja	
														Sangat Rendah	Sangat Rendah



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITANG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (R-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2023 (R-1) yang diakuisisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diakuisisi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8				12		13=12/R-100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Memperkuatnya Indeks Reformasi Berkorupsi (IRBI)	PROGRAM PENGENDALIAN SZIN USAHA INDUSTRI KABUPATENKOTA	Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha (Persen)	35,00	100.000.000	9,30	-	37,5	4.272.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Pemerintah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kawasan Kabupaten/Kota	Persentase izin yang disertai dan dimiliki terhadap izin yang diakuisisi (Persen)	100,00	100.000.000	0,00	-	15	4.272.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan pendirian IUI, IPUI, UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Finalisasi Verifikasi Teknik Pemenuhan Kewenangan Perizinan Teknik Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dokumen)	0,00	100.000.000	0,00	-	4	4.272.200	-	-	2	-	2	-	50,00%	0,00%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	0,00%
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Peningkatan dalam Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi Industri di SINAS (Persen)	75,00	512.000.000	54,33	-	58,33	59.815.500	2.415.000	16.000.500	-	19.023.500	0,00%	31,91%		



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur bersumber dari kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur yang mengampu urusan Penanaman modal diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Perubahan 2021-2026. Penetapan Indikator ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing pada urusan masing-masing Perangkat Daerah. Akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan setiap tahun merupakan kondisi kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan urusan penanaman modal sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur data capaiannya bersumber dari data capaian kinerja urusan Penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung di tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dalam tabel 2.2



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitang Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Indikator Renstra 2021-2026												
1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik PTSP			53	54	60	67	73,83	78,73	Na	78,73	Realisasi tahun 2023 belum tersedia karena data bersifat tahunan
1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang			65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	74,75 = C	85,33 = B	Na	85,33 = B	
1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah			B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	63,08 = B	71,72 = B	71,72 = B	71,72 = B	
1.3	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan			Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang (79,99)	81,5 (kualitas tinggi)	Na	81,5 (kualitas tinggi)	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,6	2,7	2,8	2,9	2,15	2,7	Na	2,7	
2.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi			63 persen	65,00 persen	67,00 persen	69,00 persen	83,33persen	100 persen	Na	100 persen	
3	Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN)			359,057 juta rupiah	378771 juta rupiah	390513 juta rupiah	472,466 juta rupiah		1.373,500 juta rupiah	Na	1.373,500 juta rupiah	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITONG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
3.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMON/PMA) berdasarkan IKPM			11,16 persen	11,20 persen	11,40 persen	11,60 persen	64,84 persen	22,67 persen	Na3	22,67 persen	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan Penanaman modal dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, menghadapi berbagai permasalahan dan isu strategis. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Belitung Timur. Faktor penyebab yang terkait dengan isu strategis ini diantaranya:
 - a. Kurangnya informasi potensi investasi yang lebih terperinci dan terkini
 - b. Masih banyak masyarakat yang belum paham proses perizinan secara online
 - c. Belum optimalnya pengembangan Sistem OSS RBA yang digunakan untuk proses perizinan berusaha dan belum terintegrasinya OSS RBA dengan SIMBG, GISTARU, AMDALNET.
 - d. Rendahnya kesadaran penanam modal dalam melaporkan nilai real (sebenarnya) realisasi investasi mereka.
2. Adanya perubahan susunan perangkat daerah, DPMPTSP dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintah di bidang penanaman modal, tidak merempun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah lainnya, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 mengenai struktur kelembagaan dan tupoksi DPMPTSP. Untuk menjawab faktor penyebab tersebut didalam perubahan rencana kerja tahun 2023 ini dilakukan berbagai penyesuaian diantaranya Penyesuaian kebutuhan anggaran untuk mencapai target dari program/ kegiatan dan sub kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

Dari Renja Perubahan yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang adapada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, dengan memperhatikan rencana strategis kementerian terkait dan kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur guna diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rencana kerja RKPD Perubahan yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan



yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan dan identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD maupun DAK berikut pendanaan indikatif.

Perbedaan antara Rencana Kerja awal dengan hasil analisis kebutuhan sebagian besar disebabkan :

1. Penyesuaian beberapa target indikator sub kegiatan.
2. Perubahan pagu indikatif yang disesuaikan dengan rencana target indikator dan kebutuhan yang akan dicapai pada tahun 2023;
3. Perubahan rencana pelaksanaan pekerjaan pada usulan Rencana Kerja awal rencana kerja tahun 2023 dengan rencana kebutuhan pada rencana kerja perubahan 2023, untuk kegiatan yang bersumber dari DAK Bidang Fasilitas Penanaman modal di tahun 2023 dikarenakan Juknis penggunaan DAK Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal baru terbit pada tanggal 30 Desember tahun 2022, sehingga pada rencana kerja perubahan tahun 2023 ini dilakukan penyesuaian.
4. Perubahan Susunan Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 Review terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.



Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja Perubahan RKPD Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	TARGET	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	TARGET	Pagu (Rp)	
URUSAN PENUNJANG				6.216.401.236	URUSAN PENUNJANG				6.216.401.236	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	73 persen	6.216.401.236	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	73 persen	6.216.401.236	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 persen	5.322.400	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 persen	5.322.400	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.322.400	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.322.400	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100 persen	4.347.136.836	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100 persen	4.347.136.836	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	4.347.136.836	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	4.347.136.836	
Kegiatan Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik	77 persen	29.100.000	Kegiatan Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik	77 persen	29.100.000	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITANG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	TARGET	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	TARGET	Pagu (Rp)	
Pengadaan Pakisan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	OPD	Jumlah Paket Pakisan Dinas beserta Atribut kelengkapannya	1 paket	4.400.000	Pengadaan Pakisan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	OPD	Jumlah Paket Pakisan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	4.400.000	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Kab. Belitang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	24.700.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Kab. Belitang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	24.700.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	82,5 persen	704.501.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	82,5 persen	704.501.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	19.104.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	19.104.500	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	119.648.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	119.648.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	41.673.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	41.673.500	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	40.372.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	40.372.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	72.875.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	72.875.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	8.360.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	8.360.000	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITONG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	OPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8 laporan	4.468.000	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	OPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8 laporan	4.468.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 laporan	400.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 laporan	400.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	55 persen	124.491.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	55 persen	124.491.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	64.291.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	64.291.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	60.200.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	60.200.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	85 persen	676.935.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	85 persen	676.935.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	157.857.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	157.857.500	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	102.820.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	102.820.000	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	TARGET	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	TARGET	Pagu (Rp)	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	326.257.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	326.257.500	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	92 persen	328.915.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	92 persen	328.915.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Belitum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	20 unit	239.750.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Belitum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	20 unit	239.750.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Belitum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	55.805.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Belitum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	55.805.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Belitum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	33.360.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Belitum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	33.360.000	
PENANAMAN MODAL				961.197.200	PENANAMAN MODAL				961.197.200	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	66,67 persen	32.282.400	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	66,67 persen	32.282.400	
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha di bidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	2 kebijakan	10.485.200	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha di bidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	2 kebijakan	10.485.200	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITONG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Belitum	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 kegiatan usaha	10.485.200	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Belitum	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 kegiatan usaha	10.485.200	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia	100 persen	21.797.200	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia	100 persen	21.797.200	
Penyediaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Belitum	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	21.797.200	Penyediaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Belitum	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	21.797.200	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi	2 investor	132.176.300	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi	2 investor	132.176.300	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	1 dokumen	132.176.300	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	1 dokumen	132.176.300	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Belitum	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	132.176.300	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Belitum	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	132.176.300	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	64 persen	203.940.500	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	64 persen	203.940.500	
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	3 persen	203.940.500	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	3 persen	203.940.500	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITANG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Belitang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	175 pelaku usaha	203.940.500	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Belitang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	175 pelaku usaha	203.940.500	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	19 investor	546.437.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	19 investor	546.437.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	7,5 persen	546.437.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	7,5 persen	546.437.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Belitang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 kegiatan usaha	103.637.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Belitang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 kegiatan usaha	103.637.200	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Belitang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 pelaku usaha	274.988.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Belitang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 pelaku usaha	274.988.200	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITONG TIMUR**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2023**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Belitum	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 kegiatan usaha	187.811.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Belitum	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 kegiatan usaha	187.811.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	63,64 persen	46.361.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	63,64 persen	46.361.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	90 persen	46.361.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	90 persen	46.361.000	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Belitum	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dibagi dan Dimanfaatkan	12 dokumen	46.361.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Belitum	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dibagi dan Dimanfaatkan	12 dokumen	46.361.000	
JUMLAH				7.177.598.436	JUMLAH				7.177.598.436	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan untuk urusan Penanaman modal pada tahun 2023 tidak ada,



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur berasal dari perubahan Rencana Kerja Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023. Program, kegiatan tersebut sudah terangkum dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Program, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur. Berikut Tujuan dan Sasaran yang ada dalam dokumen perencanaan DPMPTSP yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, yaitu:

Untuk mendukung misi I : **Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik**, berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan :

Tujuan:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Sasaran :

- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja;
- Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah;
- Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Untuk mendukung misi II : **Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja**, berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan :

Tujuan:

- Meningkatnya investasi;

Sasaran :



- Meningkatkan investor yang berinvestasi;

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur merupakan jalan untuk terwujudnya visi dan misi dari Kepala Daerah yang sudah menjadi visi dan misi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 bersumber dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar Rp 14.509.003.872,- terdiri dari urusan penunjang sebesar Rp 6.271.289.542,- Urusan Penanaman Modal sebesar Rp 934.490.550,-, Urusan Perdagangan sebesar 1.987.551.760,- dan urusan perindustrian sebesar Rp 5.315.672.020 , namun dalam Renja Perubahan tahun 2023 ini ada perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Urusan Penanaman Modal diampu oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Urusan Perdagangan dan Perindustrian diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk itu pada penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 ini, yang semula Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 yang mengampu urusan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian pada perubahan rencana kerja ini berubah hanya urusan penanaman modal saja. Sedangkan urusan perdagangan dan perindustrian disusun dokumen rencana kerja tersendiri. Sehingga Rencana pagu program/kegiatan/ sub kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur berubah menjadi sebesar Rp 11.998.696.132,- terdiri dari urusan penunjang sebesar Rp 5.660.230.932,- , urusan Penanaman modal sebesar Rp 964.881.200,- dan urusan Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 5.373.584.000,-. Untuk urusan perindustrian dan perdagangan pada rencana kerja perubahan ini masih ditampilkan dikarenakan periode Januari sampai dengan September kedua urusan tersebut masih menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

Perubahan pagu ini dikarenakan berbagai macam alasan diantaranya :

1. Adanya perubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
2. Diterimanya anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melebihi dari penerimaan DAK tahun 2022 yang ada dalam Renja 2023, yaitu berupa DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal;



3. Adanya rasionalisasi beberapa kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga ada beberapa pekerjaan yang pada renja tahun 2022 diusulkan namun pada saat tahapan penyusunan PPAS tidak terakomodir;
4. Adanya penyesuaian anggaran, dengan kebutuhan dan target indikator yang akan dicapai.

Berikut Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif tahun 2023 dan Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur

No	Urusan	Renja Mumi Tahun 2023				Renja Perubahan Tahun 2023			
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Penanaman Modal	5	6	8	934.490.550	5	6	8	964.881.200
2	Perdagangan	4	6	9	1.987.551.760	4	6	9	2.879.383.500
3	Perindustrian	3	3	7	5.315.672.020	2	2	6	2.494.200.500
4	Urusan Penunjang	1	7	20	6.271.289.542	1	6	19	5.660.230.932
	JUMLAH				14.509.003.872				11.998.696.132



Tabel 3.2
Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023				Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023		Renja Perubahan		Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4		4		5	5	5	2			6	7
URUSAN PENUNJANG						6.271.289.542	6.216.401.236	5.637.504.516					9.487.747.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	73	persen	73	persen	6.271.289.542	6.216.401.236	5.660.230.932				persen	9.487.747.000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	persen	100	persen	5.322.400	5.322.400	-				100	persen 25.000.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	-	Dokumen	5.322.400	5.322.400	-	OPD	APBD	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	4	Dokumen 25.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100	persen	100	persen	4.360.330.142	4.347.136.836	3.806.051.432				100	persen 7.114.247.000
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang	36	Orang	4.360.330.142	4.347.136.836	3.806.051.432	OPD	APBD	ASN	36	Orang 7.114.247.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	77	persen	77	persen	29.100.000	29.100.000	28.400.000				77	persen 131.000.000



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	4.400.000	4.400.000	4.400.000	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPTSP	1 paket	76.000.000
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	4 Orang	24.700.000	24.700.000	24.000.000	Luar Daerah dan Kab. Belitim	APBD	ASN dan pegawai DPMPTSP	10 Orang	55.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	82,5 persen	82,5 persen	729.501.000	704.501.000	671.478.500				60 persen	857.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	19.104.500	19.104.500	18.439.500	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPTSP	12 paket	28.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	119.648.000	119.648.000	117.818.000	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPTSP	12 paket	100.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	9 paket	41.673.500	41.673.500	32.104.000	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPTSP	9 paket	47.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	40.372.000	40.372.000	40.372.000	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPTSP	12 paket	35.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	72.875.000	72.875.000	54.437.000	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPTSP	12 paket	85.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	6.360.000	6.360.000	3.840.000	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPTSP	3 dokumen	7.500.000
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 laporan	8 laporan	4.468.000	4.468.000	4.468.000	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPTSP	8 laporan	5.000.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 laporan	76 laporan	425.000.000	400.000.000	400.000.000	Luar Daerah	APBD	ASN dan pegawai DPMPTSP	76 laporan	550.000.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	55 persen	55 persen	124.491.000	124.491.000	124.491.000				persen	150.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	60.200.000	60.200.000	60.200.000	OPD	APBD	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	1 unit	150.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 unit	13 unit	64.291.000	64.291.000	64.291.000	OPD	APBD	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	1 unit	150.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	85 persen	85 persen	676.935.000	676.935.000	697.895.000				persen	765.000.000



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	157.857.500	157.857.500	186.487.500	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPSTP	3 laporan	235.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	192.820.000	192.820.000	182.620.000	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPSTP	1 laporan	140.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	326.257.500	326.257.500	328.787.500	OPD	APBD	ASN dan pegawai DPMPSTP	3 laporan	390.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	92 persen	92 persen	345.610.000	328.915.000	331.915.000				92 persen	445.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit	256.445.000	239.750.000	239.750.000	Kab. Belitim	APBD	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	unit	315.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	55.805.000	55.805.000	55.805.000	Kab. Belitim	APBD	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	- unit	65.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	50 unit	33.360.000	33.360.000	36.360.000	Kab. Belitim	APBD	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	3 unit	65.000.000
PENANAMAN MODAL				934.490.550	961.197.200	964.881.200					1.512.626.800
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	66,67 persen	66,67 persen	41.931.500	32.282.400	32.282.400				- persen	50.000.000



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	2 kebijakan	2 kebijakan	18.756.500	10.485.200	10.485.200				- kebijakan	-
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 kegiatan usaha	1 kegiatan usaha	18.756.500	10.485.200	10.485.200	Kab. Belitim	APBD	Pelaku usaha/ investor/ penanam modal	- kegiatan usaha	-
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia	100 persen	100 persen	23.175.000	21.797.200	21.797.200				- persen	50.000.000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	23.175.000	21.797.200	21.797.200	Kab. Belitim	APBD	Pelaku usaha/ investor/ penanam modal	- dokumen	50.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	2 investor	2 investor	140.380.300	132.176.300	132.176.300				- investor	500.000.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	1 dokumen	1 dokumen	140.380.300	132.176.300	132.176.300				- dokumen	500.000.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	140.380.300	132.176.300	132.176.300	Kab. Belitim	APBD	Pelaku usaha/ investor/ penanam modal	- dokumen	500.000.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	84 persen	84 persen	204.240.500	203.940.500	217.962.000				84 persen	319.195.800



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	9 persen	9 persen	204.240.500	203.940.500	217.962.000				- persen	319.195.800
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	175 pelaku usaha	800 pelaku usaha	204.240.500	203.940.500	217.962.000	Kab. Belitung	APBD	Masyarakat, pelaku usaha dan pegawai PTSP	163 pelaku usaha	319.195.800
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	19 investor	19 investor	501.327.250	546.437.000	531.339.500				- investor	583.431.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	7,5 persen	7,5 persen	501.327.250	546.437.000	531.339.500				- persen	583.431.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 kegiatan usaha	10 kegiatan usaha	126.414.750	103.637.200	37.056.500	Kab. Belitung	APBD	masyarakat, pelaku usaha, penanam modal/ investor	- kegiatan usaha	140.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 pelaku usaha	200 pelaku usaha	234.144.000	274.988.200	336.022.000	Kab. Belitung	APBD + DAK	masyarakat, pelaku usaha, penanam modal/ investor	- pelaku usaha	218.431.000



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 kegiatan usaha	50 kegiatan usaha	140.768.500	167.811.600	158.261.000	Kab. Belitim	APBD + DAK	masyarakat, pelaku usaha, penanam modal/ investor	- kegiatan usaha	225.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	63,64 persen	63,64 persen	46.611.000	46.361.000	51.121.000				50 persen	60.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	90 persen	90 persen	46.611.000	46.361.000	51.121.000				86 persen	60.000.000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	12 dokumen	46.611.000	46.361.000	51.121.000	Kab. Belitim	APBD	masyarakat, pelaku usaha, penanam modal/ investor	2 dokumen	60.000.000
PERDAGANGAN				1.987.551.760	3.287.442.760	2.879.383.500					-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 persen	100 persen	1.389.698.000	1.389.618.000	1.148.669.000					-
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan/pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	100 persen	100 persen	1.389.698.000	1.389.618.000	1.148.669.000					-
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	2 unit	267.750.000	267.750.000	192.750.000	Kec. Gantung, Kec. Renggiang, Kec. K. kampit	APBD			-



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 unit	4 unit	1.121.948.000	1.121.868.000	955.919.000	Kab. Belitim	APBD			-
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,59 persen	3,59 persen	338.897.500	1.638.868.500	1.614.786.500					-
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten/ Kota di Tingkat Daerah	Tingkat kecukupan stok Bapokting (Barang Pokok dan Barang Penting)	75 hari	75 hari	31.745.000	31.741.000	24.010.000					-
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 laporan	4 laporan	31.745.000	31.741.000	24.010.000	Kab. Belitim	APBD			-
Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Rata-rata Nasional	60 persen	60 persen	300.987.500	1.600.987.500	1.584.636.500					-
Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	15 laporan	12 laporan	72.990.000	72.990.000	67.415.000	Kab. Belitim	APBD			-



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	227.997.500	1.527.997.500	1.517.221.500	Kab. Belitim	APBD			
Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Rasio penerima pupuk terhadap RDKK	0,75 persen	0,75 persen	6.165.000	6.140.000	6.140.000					-
Pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 laporan	4 laporan	6.165.000	6.140.000	6.140.000	Kab. Belitim	APBD			-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor	1 produk	1 produk	20.000.000	20.000.000	19.999.500					-
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha yang memperoleh Fasilitas Promosi Produk Unggulan Ekspor (Pelaku Usaha)	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	20.000.000	20.000.000	19.999.500					-
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	1 pelaku usaha	1 pelaku usaha	20.000.000	20.000.000	19.999.500	Kab. Belitim	APBD			-
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP bertanda tersah yang berlaku	72,5 persen	72,5 persen	238.956.260	238.956.260	95.928.500					
	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	72 persen	72 persen								-



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	UTTP Bertanda tera sah	875 UTTP	875 UTTP	238.956.260	238.956.260	95.928.500					-
	Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran metrologi legal	5 Pelaku usaha	5 Pelaku usaha	-	-	-					-
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera dan Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	700 unit	700 unit	211.239.530	211.239.530	80.016.500	Kab. Belitim	APBD			-
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 orang	30 orang	27.716.730	27.716.730	15.912.000	Kab. Belitim	APBD			-
PERINDUSTRIAN				5.315.672.020	3.009.607.100	2.494.200.500					-
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	5,85 persen	5,85 persen	5.251.784.320	2.945.719.400	2.465.465.000					-
Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri kecil menengah (IKM) yang berkembang/ tumbuh setelah mendapat pelatihan dan pendampingan	42,5 persen	42,5 persen	5.251.784.320	2.945.719.400	2.465.465.000					-
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4 dokumen	4 dokumen	7.409.900	7.409.900	6.509.900	Kab. Belitim	APBD			-



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 dokumen	4 dokumen	66.409.800	66.409.800	16.792.400	Kab. Belitim	APBD			-
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 dokumen	4 dokumen	18.020.000	18.020.000	11.660.000	Kab. Belitim	APBD			-
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 dokumen	4 dokumen	5.124.583.520	2.818.518.600	2.400.971.600	Kab. Belitim	APBD + DAK			-
Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12 dokumen	12 dokumen	35.361.100	35.361.100	29.531.100	Kab. Belitim	APBD			-
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha	27,5 persen	27,5 persen	4.272.200	4.272.200	-					-
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin yang dipantau dan dianalisis terhadap izin yang dikeluarkan	15 persen	15 persen	4.272.200	4.272.200	-					-



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2023**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2023		Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2024	
		APBD 2023	Renja Perubahan	Renja 2023	APBD 2023	Renja Perubahan 2023				Kinerja	Pagu Indikatif
1	3	4	4	5	5	5	2			6	7
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	4 dokumen	4 dokumen	4.272.200	4.272.200	-					-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi Industri di SIINAS	58,33 persen	58,33 persen	59.615.500	59.615.500	28.735.500					-
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menyampaikan data dan informasi secara lengkap	90,5 persen	90,5 persen	59.615.500	59.615.500	28.735.500					-
Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 dokumen	4 dokumen	59.615.500	59.615.500	28.735.500	Kab. Belitim	APBD			-
JUMLAH				14.509.003.872	13.474.648.296	11.998.696.133					11.000.373.800



BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 untuk Tahun Anggaran 2023.

Manggar, 28 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan
Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur



ARLI AGUSTA, ST

019750821 200212 1 005

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Selayang Timur
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD Tahun 2021	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sumber	Praktik Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Samudra	Manjari	RPMD 2023	APMD 2023	RPMD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAKIL YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERANAMAN MODAL														11,340,475,888			
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Colaborasi (Synergy) program yang melibatkan pelaksanaan urusan pemerintahan	Perum	Perum	73 Perum	73 Perum	6,271,288,542	6,216,401,218	5,660,239,832					73 Perum	9,877,747,000				
2 18 01 204	Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Laporan Pemungutan Nilai RUP Perangkat Daerah (R-KRP)	Nilai	Nilai	76.6 Nilai	76.6 Nilai	5,322,400	5,322,400	0					76.6 Nilai	25,000,000				
2 18 01 204 01	Pengawasan Dukungan Pemantauan Perangkat Daerah	Jumlah Dukungan Pemantauan Perangkat Daerah			4 Dukungan	4 Dukungan	5,322,400	5,322,400		Kabupaten Selayang Timur, Kecamatan Selayang	Dana Transfer Umum-Dana Abian Umum-Pembiayaan Pembiayaan	Mempertahankan Stabilitas, Infrastruktur Dan, Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengoptimalan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	4 Dukungan	25,000,000	Dinas Pemantauan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2 18 01 205	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Laporan Pemungutan Nilai RUP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	76.6 Nilai	76.6 Nilai	4,560,338,142	4,347,338,838	3,806,931,432					76.6 Nilai	7,114,247,888				
2 18 01 205 01	Pengadaan Kapas dan Tumpukan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Kapas dan Tumpukan ASN			34 Orang	34 Orang	4,300,000,142	4,307,136,838	3,000,000,432	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dana Transfer Umum-Dana Abian Umum	Mempertahankan Stabilitas, Infrastruktur Dan, Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengoptimalan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	34 Orang	1,134,247,000	Dinas Pemantauan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2 18 01 205 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Laporan Pemungutan Nilai RUP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai	76.6 Nilai	76.6 Nilai	29,588,000	29,588,000	20,400,000					76.6 Nilai	171,000,888				
2 18 01 205 02 01	Pengadaan Pakan (Diet) dan Obat (Medik) Karyawan	Jumlah Pakan Pakan Diet dan Obat, Karyawan			1 Paket	1 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kabupaten Selayang Timur, Kecamatan Selayang	Dana Transfer Umum-Dana Abian Umum-Pembiayaan Pembiayaan	Mempertahankan Stabilitas, Infrastruktur Dan, Transformasi Pelayanan Publik	6. Pengoptimalan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1 Paket	70,000,000	Dinas Pemantauan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2 18 01 205 02 11	Rekrutmen Teknis Implementasi Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Rekrutmen Teknis Implementasi			30 Orang	4 Orang	24,700,000	24,700,000	24,000,000		Dana Transfer Umum	Mempertahankan Stabilitas, Infrastruktur	Meningkatkan Pelayanan	4 Orang	55,000,000	Dinas Pemantauan Modal			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Indikator Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan										Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Sumber Dana	Prioritas	Kategori Barang	Target	Pagu Indikatif			
						Secara	Merajut	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan						Nasional	Daerah	
1.10.01.200.08	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pendidikan	Indikator Dokumen Baku Baku dan Perlengkapan Pendidikan yang Disalurkan				3 Dokumen	3 Dokumen	6.180.000	6.180.000	6.180.000	Dana Transfer Umum- Dana Abdi- Urban Pemerintah Kabupaten			Merengglah as Pelayanan Administrasi Pembinaan dan Akreditasi s Gereja	2 Dokumen	7.500.000	Dinas Pendidikan Muallid, Pelayanan Terpadu Satu Peta	
1.10.01.200.08	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pendidikan	Indikator Laporan Tugas Laporan Baku				8 Laporan	8 Laporan	4.490.000	4.490.000	4.490.000	Dana Transfer Umum- Dana Abdi- Urban Pemerintah Kabupaten			Merengglah as Pelayanan Administrasi Pembinaan dan Akreditasi s Gereja	8 Laporan	5.000.000	Dinas Pendidikan Muallid, Pelayanan Terpadu Satu Peta	
1.10.01.200.08	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pendidikan	Indikator Laporan Penyediaan Baku Koordinasi dan Berkas RKPD				76 Laporan	76 Laporan	42.000.000	42.000.000	42.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Abdi- Urban Pemerintah Kabupaten			Merengglah as Pelayanan Administrasi Pembinaan dan Akreditasi s Gereja	76 Laporan	55.000.000	Dinas Pendidikan Muallid, Pelayanan Terpadu Satu Peta	
1.10.01.201	Pengadaan Barang Milik Daerah Penanggung Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Laporan Penanggung Urusan Penanggung Urusan	Nilai Nilai	Nilai Nilai	Nilai Nilai	76,6 Nilai 76,6 Nilai	76,6 Nilai 76,6 Nilai	124.491.000	124.491.000	124.491.000					76,6 Nilai 76,6 Nilai	506.000.000		
1.10.01.201.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penanggung Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Unit Kerja Kerja atau Kegiatan Lainnya yang Disalurkan				3 Unit	3 Unit	60.200.000	60.200.000	60.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Beri Hati Dana Transfer Umum- Dana Abdi- Urban Pemerintah Kabupaten			Merengglah as Pelayanan Administrasi Pembinaan dan Akreditasi s Gereja	3 Unit	150.000.000	Dinas Pendidikan Muallid, Pelayanan Terpadu Satu Peta	
1.10.01.201.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penanggung Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Unit Kerja Kerja atau Kegiatan Lainnya yang Disalurkan				13 Unit	13 Unit	64.291.000	64.291.000	64.291.000	Dana Transfer Umum- Dana Abdi- Urban Pemerintah Kabupaten			Merengglah as Pelayanan Administrasi Pembinaan dan Akreditasi s Gereja	13 Unit	150.000.000	Dinas Pendidikan Muallid, Pelayanan Terpadu Satu Peta	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Belitang Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan										Kategori Baris	Proyeksi Monev Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Samudra	Manjail	RPJPD 2023	APBD 2023	RPJPD 2023 Pendanaan		Nasional	Daerah						
											Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil								
2 18 01 200	Pengadaan Jasa Penyewaan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penyewaan Indeks Kepuasan Layanan Penyewaan	Nilai Nilai	Nilai Nilai	Nilai Nilai			676,911,000	676,911,000	667,895,000					76,6 76,6	705,000,000			
2 18 01 200 01	Pengadaan Jasa Sewa Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sewa Menengah				12 Laporan	12 Laporan	157,857,500	157,857,500	166,467,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sewa Kecamatan Sewas Gubernur			Meningkatkan Polysyner Admistrasi Pelayanan dan Akuntabilitas Gereja	12 Laporan	235,000,000	Dana Pelayanan Moral Pelayanan Sesuai Suku Perti		
2 18 01 200 02	Pengadaan Jasa Konsultasi, Survei Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Survei Daya Air dan Listrik yang Disalurkan				4 Laporan	4 Laporan	192,620,000	192,620,000	192,620,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sewa Kecamatan Sewas Gubernur			Meningkatkan Polysyner Admistrasi Pelayanan dan Akuntabilitas Gereja	4 Laporan	140,000,000	Dana Pelayanan Moral Pelayanan Sesuai Suku Perti		
2 18 01 200 04	Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disalurkan				12 Laporan	12 Laporan	626,257,500	626,257,500	626,797,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sewa Kecamatan Sewas Gubernur			Meningkatkan Polysyner Admistrasi Pelayanan dan Akuntabilitas Gereja	12 Laporan	390,000,000	Dana Pelayanan Moral Pelayanan Sesuai Suku Perti		
2 18 01 203	Pembayaran Sewa Miliar Daerah Penyewaan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penyewaan Indeks Kepuasan Layanan Penyewaan	Nilai Nilai	Nilai Nilai	Nilai Nilai			345,818,000	328,915,000	351,935,000					76,6 76,6	445,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub-Registri	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-Registri	Target Akhir Periode RPJMD Tahun 2021	Indikator Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan								Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Sumber Dana	Prioritas	Kolom Revisi	Target	Pagu Indikatif		
						Sewa	Majelis	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendidikan					Nasional		Daerah
2.16.01.201.02	Pengembangan Jasa Pendidikan, Riset, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Teknologi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kemitraan yang Optimal atau Lapangan yang Didukung dan Alapannya yang Didukung				20 Unit	20 Unit	250.445.000	259.750.000	259.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Serana Kecamatan-Serana Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pemerintah Kabupaten	Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Akuntabilitas Kerja	20 Unit	315.000.000	Dinas Pemerintahan, Mutiara, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.16.01.201.03	Pembinaan/Waktu Sibuk Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didukung/Dirubuhkan				3 Unit	3 Unit	55.825.000	55.825.000	55.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Serana Kecamatan-Serana Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pemerintah Kabupaten	Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Akuntabilitas Kerja	3 Unit	65.000.000	Dinas Pemerintahan, Mutiara, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.16.01.201.04	Pembinaan/Waktu Sibuk Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didukung/Dirubuhkan				50 Unit	50 Unit	33.360.000	33.360.000	33.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Serana Kecamatan-Serana Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pemerintah Kabupaten	Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Akuntabilitas Kerja	50 Unit	65.000.000	Dinas Pemerintahan, Mutiara, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.16.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER PENANAMAN MODAL	Catatan kegiatan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditugaskan	Persen	Persen	NDRT Persen GTGT Persen			41.931.300	32.282.400	32.282.400				67,87 Persen	50.000.000		
2.16.02.201	Pemetaan Pemukiman Fasilitas/Investor Dibidang Penanaman Modal yang Merupakan Kawasan Daerah Ekspansi/Kota	Persentase pemukiman investor yang membidani investasi (PPN/PMA) Industri/KPM	Persen	Persen	T1,4 Persen T1,4 Persen			18.758.500	10.485.200	10.485.200				11,4 Persen	0		
2.16.02.201.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemetaan Fasilitas/Investor dan Ketersediaan Amanan Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Peta Usaha yang Mendukung Investasi dan Ketersediaan Pemenuhan Gaji				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	18.758.500	10.485.200	10.485.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Serana Kecamatan-Serana Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pemerintah Kabupaten	Meningkatkan Investasi yang Berkelanjutan	1 Kegiatan Usaha		Dinas Pemerintahan, Mutiara, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.16.02.202	Pendataan Peta Potensi Investasi Ekspansi/Kota	Persentase pemukiman investor yang membidani investasi	Persen	Persen	T1,4 Persen T1,4 Persen			25.375.000	21.797.200	21.797.200				11,4 Persen	50.000.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Target RPMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan										Prestasi Kerja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023		Pagu Indikatif			Sesuai	Sesuai Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
					Sesuai	Merjuali	RPMD 2023	APBD 2023	RPMD 2023 Pendaklan			Nasional	Daerah				
		(PAD/R/PMU) berdasarkan UPTM															
2 10 02 202 02	Pengadaan Peta Potensi dan Petaung Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Inventaris dan Petaung Usaha Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	25.175.000	21.787.000	21.787.000	Kas, Saluran Trans, Sman, Kematikan, Sman, Kematikan	Data Tersebut Usman - Data Akhisi Usman - Peta Potensi Tersebut Arda (Sman)			Meningkatkan investasi yang berorientasi	1 Dokumen	20.000.000	Daerah Perencanaan Modal Pelayanan Terpadu Saku Peta
2 10 04	PROGRAM PENGADAAN MODAL	Investor baru yang berorientasi	Investor	Investor	2 Investor	2 Investor	140.886.000	142.174.000	142.174.000						2 Investor	500.000.000	
2 10 03 201	Pengembangan Perencanaan Modal yang Merjuali Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan investor yang berorientasi berorientasi berorientasi (PAD/R/PMU) berdasarkan UPTM	Persari	Persari	11,4 Persari	11,4 Persari	140.886.000	142.174.000	142.174.000						11,4 Persari	500.000.000	
2 10 03 201 02	Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Modal Secara Suboptimal/Neta	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Perencanaan Modal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Perencanaan Modal Kabupaten/Kota			0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	540.380.000	132.174.000	132.174.000		Data Tersebut Usman - Data Akhisi Usman - Peta Potensi Tersebut Arda (Sman)	Meningkatkan Kematikan - Data Akhisi Usman - Peta Potensi Tersebut Arda (Sman)		Meningkatkan investasi yang berorientasi	0 Dokumen 1 Dokumen	500.000.000	Daerah Perencanaan Modal Pelayanan Terpadu Saku Peta
2 10 04	PROGRAM PELAYANAN PENGALAMAN MODAL	Persentase penyediaan pelayanan dan pencapaian yang sesuai	Persari	Persari	84 Persari	84 Persari	204.240.500	202.940.500	217.962.000						84 Persari	210.195.800	
2 10 04 201	Pelayanan Perencanaan dan Risa Perencanaan Secara Terpadu Saku Peta dibidang Perencanaan Modal yang Merjuali Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Kepuasan Pelayanan	Nila	Nila	75 Nila	75 Nila	204.240.500	202.940.500	217.962.000						75 Nila	210.195.800	
2 10 04 201 01	Pengadaan Pelayanan Terpadu Perencanaan dan Berorientasi	Jumlah Peta Potensi yang Berorientasi Pelayanan Terpadu Perencanaan dan Risa			175 Peta Potensi Usman	200 Peta Potensi Usman	205.205.500	202.940.500	217.962.000	Kas, Saluran Trans, Sman	Data Tersebut Usman - Data Akhisi Usman - Peta Potensi Tersebut Arda (Sman)	Meningkatkan Kematikan - Data Akhisi Usman - Peta Potensi Tersebut Arda (Sman)		Meningkatkan investasi yang berorientasi	200 Peta Potensi Usman	210.195.800	Daerah Perencanaan Modal Pelayanan Terpadu Saku Peta

**Penetapan Perolehan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Boliung Timur
Tahun 2023**

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan								Kategori Sarana	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Sektor	Sawah Daerah	Prioritas		Kategori Sarana	Target		Pagu kreditif
						Samudra	Marjati	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendapatan			Nasional	Daerah				
	Berikutnya Sistem Pelaporan Perencanaan Berbasis Tetapannya Sistem Elektronik	Perencanaan Berbasis Sistem Pelaporan Perencanaan Berbasis Tetapannya Sistem Elektronik									Keuangan Sektor Eksternal	Adaptasi Sistem Pelaporan Berbasis Akses Daerah	Pelaporan Publik			Terwujudnya Sistem Elektronik		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANILIAN MODAL	Berikutnya baru berlatar nasional yang memadukan memadukan	Berikutnya		Berikutnya	10 Berikutnya	10 Berikutnya	301,327,250	346,437,000	301,338,500					10 Berikutnya	301,338,500		
2.18.05.201	Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Modal yang Mempertahankan Dampak Kabupaten/Kota	Perencanaan perencanaan modal yang memadukan memadukan (PMD/PMS) berdasarkan (KPM)	Berikutnya		Berikutnya	11.4 Berikutnya	11.4 Berikutnya	301,327,250	346,437,000	301,338,500					11.4 Berikutnya	301,338,500		
2.18.05.201.01	Kontribusi dan Sistem Pelaksanaan Perencanaan Modal	Terdapat Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Membantu Koordinasi dan Sistem Pelaksanaan Perencanaan Modal				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	68,414,750	69,637,200	67,954,900	Kab. Boliung Timor, Sektor Eksternal Sektor Eksternal	PENGENDALIAN AJIB DASAR (PMD) DAK Non Fiskal Fiskal Perencanaan Modal Pelaporan Transfer Akses Daerah	Mempertahankan Eksternal Eksternal Untuk Perencanaan yang Berkelanjutan dan Berkelanjutan	2. Optimalisasi pelaksanaan program inovasi daerah untuk perencanaan ekonomi	Meningkatkan dan investasi yang berkelanjutan	10 Kegiatan Usaha	140,000,000	Dinas Perencanaan Modal, Pelaporan Terwujudnya Sistem Elektronik
2.18.05.201.02	Kontribusi dan Sistem Pelaksanaan Perencanaan Modal	Terdapat Pelaku Usaha yang Membantu Perencanaan Pelaksanaan Perencanaan Modal				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	238,140,000	274,580,300	336,622,600	Kab. Boliung Timor, Sektor Eksternal Sektor Eksternal	Dinas Perencanaan Modal DAK Non Fiskal Fiskal Perencanaan Modal Pelaporan Transfer Akses Daerah	Mempertahankan Eksternal Eksternal Untuk Perencanaan yang Berkelanjutan dan Berkelanjutan		Meningkatkan dan investasi yang berkelanjutan	200 Pelaku Usaha	216,430,000	Dinas Perencanaan Modal, Pelaporan Terwujudnya Sistem Elektronik
2.18.05.201.03	Kontribusi dan Sistem Pelaksanaan Perencanaan Modal	Terdapat Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Membantu Koordinasi dan Sistem Pelaksanaan Perencanaan Modal				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	68,168,980	67,815,800	68,291,600	Kab. Boliung Timor, Sektor Eksternal Sektor Eksternal	Dinas Perencanaan Modal DAK Non Fiskal Fiskal Perencanaan Modal Pelaporan Transfer Akses Daerah	Mempertahankan Eksternal Eksternal Untuk Perencanaan yang Berkelanjutan dan Berkelanjutan		Meningkatkan dan investasi yang berkelanjutan	10 Kegiatan Usaha	225,000,000	Dinas Perencanaan Modal, Pelaporan Terwujudnya Sistem Elektronik

**Penetapan Perolakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Boliung Timur
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prestasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan										Kategori Sarana	Prestasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Duga Indikator			Subsidi	Sedek Dana	Prioritas		Target		Page kreditasi		
						Samudra	Marjati	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendapatan			Nasional	Daerah					
2 18 06	PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERANAMAN MODAL	Persentase data permanan, non permanan dan informasi permanan modal dibuka berdasarkan akurasi data	Persen	Persen	63,61 Persen	63,61 Persen	63,61 Persen	46,811,000	46,811,000	51,121,000		Pemangan Modal Pendapatan Transfer Akses Daerah				63,61 Persen	60,990,000		
2 18 06 201	Pengelolaan Data dan Informasi Permanan dan Non Permanan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase permanan modal yang terintegrasi sistemnya (PRO/IN/PAK) berdasarkan (KPI)	Persen	Persen	11,4 Persen	11,4 Persen	11,4 Persen	46,811,000	46,811,000	51,121,000						11,4 Persen	60,990,000		
2 18 06 201 01	Pengelolaan Pergerakan dan Perubahan Data dan Informasi Permanan dan Non Permanan Pergerakan dan Perubahan Data dan Informasi Permanan dan Non Permanan	Jumlah Data dan Informasi Permanan dan Non Permanan Pergerakan dan Perubahan Data dan Informasi Permanan dan Non Permanan Pergerakan dan Perubahan Data dan Informasi Permanan dan Non Permanan			12 Dukungan	12 Dukungan	12 Dukungan	46,811,000	46,811,000	51,121,000	Kabupaten Timor Sejarah Kecamatan Sejarah Kabupaten	Dana Transfer Umum Dana Akses Umum Pendapatan Transfer Akses Daerah			Meningkatkan akurasi data berdasarkan	12 Dukungan	60,000,000	Dana Permanan Modal Pendapatan Transfer Akses Daerah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN PELIHAN																		
2 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERCAGANGAN							1,567,551,700	1,267,442,700	2,875,383,500							10,211,500,000		
2 30 03	PROGRAM PENGKAITAN SARANA DISTRIBUSI PERCAGANGAN	Persentase pengkaitan dan pengkaitan secara akurasi berdasarkan	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,300,000,000	1,300,000,000	1,140,000,000						100 Persen	8,975,000,000		
2 30 03 201	Pembangunan dan Pengkaitan Sarana Distribusi Pengkaitan	PDR sektor pengkaitan PDR sektor pengkaitan	Milyar Milyar Rupiah	Milyar Milyar Rupiah	55,94 Milyar Rupiah	55,94 Milyar Rupiah	55,94 Milyar Rupiah	1,300,000,000	1,300,000,000	1,140,000,000						55,94 Milyar Rupiah	8,975,000,000		
2 30 03 201 01	Pembangunan Sarana Distribusi Pengkaitan	Jumlah Sarana Distribusi Pengkaitan			2 Unit	2 Unit	2 Unit	1,300,000,000	1,300,000,000	1,140,000,000	Kabupaten Timor Sejarah Kecamatan Sejarah Kabupaten	Dana Transfer Umum Dana Akses Umum Pendapatan Transfer Akses Daerah Bupati			Meningkatkan akurasi data berdasarkan	2 Unit	8,000,000,000	Dana Permanan Modal Pendapatan Transfer Akses Daerah	

**Penetapan Perolehan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Boliung Timur
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Indikator Capaian RKPD Tahun 2021	Indikator Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan										Kategori Sarana	Pembelian Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Duga Indikator			Sifat	Sedek Dana	Prioritas		Target		Duga Indikator		
						Samudra	Marjati	RKPD 2023	APSD 2023	RKPD 2023 Pembelian			Nasional	Daerah					
												Pembelian Transfer Anda Daerah							
1 30 01 001 01	Pembelian Pembelian Tasir Anda Daerah	Indikator/Pembelian Pembelian Tasir Anda Daerah				4 Unit	4 Unit	1,121,940,000	1,121,940,000	1,121,940,000		Pembelian Tasir Anda Daerah				4 Unit	1,121,940,000	Dinas Pembelian Moral Pembelian Sipat Pembelian	
1 30 04	PROGRAM STABILISASI KARSA BARANG KEBUTUHAN PORDK DAN BARANG PENTING	Pembelian Tasir Anda Daerah	Pembelian	Pembelian	337 Pembelian	337 Pembelian	338,887,500	1,038,887,500	1,038,887,500							337 Pembelian	1,117,999,000		
1 30 04 001	Memorandum Kebutuhan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	PDR sektor pembelian	Milyar	Milyar	550.04 Milyar	550.04 Milyar	31,745,000	31,745,000	31,745,000							550.04 Milyar	3,000,000		
1 30 04 001 01	Pengembangan Kebutuhan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agensi dan Pasar Rakyat	Indikator/Target Pengembangan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agensi dan Pasar Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	31,745,000	31,745,000	31,745,000		Pembelian Tasir Anda Daerah				4 Laporan	1,000,000	Dinas Pembelian Moral Pembelian Sipat Pembelian	
1 30 04 002	Pengembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	PDR sektor pembelian	Milyar	Milyar	550.04 Milyar	550.04 Milyar	300,887,500	1,000,887,500	1,000,887,500							550.04 Milyar	1,104,999,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bontung Timur
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Indikator Capaian RKPD Tahun 2021	Indikator Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan										Kategori Sifat	Pencapaian Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Duga Indikator			Sifat	Sifat dan	Prioritas		Target		Page ke/total		
						Samudra	Marjati	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional	Daerah					
1.30.04.202.02	Pembinaan Harga dan Stok Barang Kelengkapan Publik dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Indikator Capaian: Persentase Harga dari Stok Barang Kelengkapan Publik dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				15 Laporan	15 Laporan	12.590.000	12.590.000	67.415.000	Kab. Bontung Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Data Transaksi, Data Aplikasi, Data Laporan, Data Laporan, Data Laporan			Meningkatkan (PDR) sektor perdagangan	15 Laporan	4.000.000	Dinas Perikanan, Monev, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.30.04.202.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Indikator Capaian: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	1 Laporan	1.577.225.000	1.577.225.000	1.577.225.000	Kab. Bontung Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Data Transaksi, Data Aplikasi, Data Laporan, Data Laporan, Data Laporan			Meningkatkan (PDR) sektor perdagangan	1 Laporan	1.100.000.000	Dinas Perikanan, Monev, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.30.04.203	Pengawasan Pasok dan Perilaku Berusaha di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PMR sektor perdagangan	Milyar	Milyar	532.94 Milyar	532.94 Milyar	6.555.000	6.540.000	6.540.000							532.94 Milyar	10.000.000		
1.30.04.203.01	Pengawasan Pengawasan dan Pengawasan Pasok dan Perilaku Berusaha	Indikator Capaian: Pengawasan dan Pengawasan Pasok dan Perilaku Berusaha dengan Realisasi Minimal 80%				4 Laporan	4 Laporan	6.165.000	6.140.000	6.140.000	Kab. Bontung Timur, Provinsi Sulawesi Selatan	Data Transaksi, Data Aplikasi, Data Laporan, Data Laporan, Data Laporan			Meningkatkan (PDR) sektor perdagangan	4 Laporan	10.000.000	Dinas Perikanan, Monev, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.30.05	PROGRAM PENSIBIHAN DESFOR	Produk unggulan yang memiliki standar ekspor	Produk	Produk	1 Produk	1 Produk	20.000.000	20.000.000	10.000.000							1 Produk	4.500.000		
1.30.05.201	Pengembangan Proses Dagang Mula Pemenuhan Dagang dan Mula Dagang bagi Produk Dagang yang terintegrasi pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PMR sektor perdagangan	Milyar	Milyar	532.94 Milyar	532.94 Milyar	20.000.000	20.000.000	10.000.000							532.94 Milyar	4.500.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kurang Penuhan								Kategori Risiko	Prestasi Kerja Kinerja Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sasaran Dasar	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Senada	Merjati	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendakim			Nasional	Daerah				
1 30 18 201 01	Pelayanan Publik Usaha Mikro	Jumlah/Pelaku Usaha Mikro yang Dilayani			1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	20.000.000	20.000.000	10.000.000	Kab. Indragiri Utara, Kecamatan Senggarang, Kecamatan Senggarang	Usaha Mikro dan Kecil Usaha Mikro dan Kecil Pengembangan Transfer Teknik Daerah			Meningkatkan pelayanan publik perdagangan	1 Pelaku Usaha	4.500.000	Daerah Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN	Penerapan ketentuan ERT yang sesuai terhadap ketentuan yang berlaku Penerapan UTP berstandarisasi yang berlaku	Persen Persen	Persen Persen	72 Persen 72,5 Persen	72 Persen 72,5 Persen	238.956.260	238.956.260	95.928.500					72 Persen 72,5 Persen	115.000.000		
1 30 06 201	Pelaksanaan Monitoring Legal, Standar Tert, dan Pengawasan	PDH sector perdagangan	Milip	Milip	510,94 Milip	550,94 Milip	238.956.260	238.956.260	95.928.500					510,94 Milip	115.000.000		
1 30 06 201 01	Pelaksanaan Monitoring Legal, Standar Tert, dan Pengawasan	Jumlah/Pelaku Usaha, Alat Dinas, Alat Peralatan, dan Alat Peralengkapan Dinas, Usah			700 Usah	700 Usah	211.235.530	211.235.530	80.000.000	Kab. Indragiri Utara, Kecamatan Senggarang, Kecamatan Senggarang	Usaha Mikro dan Kecil Usaha Mikro dan Kecil Pengembangan Transfer Teknik Daerah	Meningkatkan Efisiensi Untuk Pelayanan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatkan pelayanan publik perdagangan	700 Usah	80.000.000	Daerah Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 30 06 201 01	Pengawasan/Peng awasan Standar Monitoring Legal	Jumlah/Pelaku Usaha dan Bidang Monitoring Legal yang Dilayani			30 Orang	30 Orang	27.775.730	27.775.730	15.000.000	Kab. Indragiri Utara, Kecamatan Senggarang, Kecamatan Senggarang	PMMD/PMMD ASD (DAIRAH SRI) Usaha Mikro dan Kecil Pengembangan Transfer Teknik Daerah	Meningkatkan Efisiensi Untuk Pelayanan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatkan pelayanan publik perdagangan	30 Orang	17.500.000	Daerah Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						5.215.672.020	5.008.887.100	2.484.595.560						56.514.500.000		
1 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN INDUSTRI	Penerapan standarisasi Industri Kecil dan Menengah	Persen	Persen	5,05 Persen	5,05 Persen	5.251.784.520	2.540.719.400	2.460.465.000					5,05 Persen	56.390.500.000		

**Penetapan Perolehan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bontung Timur
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan										Kategori Sifatnya	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Duga Indikator			Sifatnya	Sifatnya	Prioritas		Target		Duga Indikator		
						Samudra	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional	Daerah					
3 01 02 201	Persiapan dan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Industri Kabupaten/Kota	Nilai Produk Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan dan Pertanian	Rajak		Rajak	25062373	25062373	25062373,754,320	2,945,718,480	2,865,485,000						25062373	25062373,754,320		
3 01 02 201 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Dukungan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Peningkatan Industri Kecil dan Menengah				4 Dukumen	4 Dukumen	7,405,800	7,405,800	6,308,900	Kat. Beking Trans. Sekt. Swasta	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	4 Dukumen	7,405,800	Daerah
3 01 02 201 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan (Transfer Daya Industri)	Jumlah Dukungan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan (Transfer Daya Industri)				4 Dukumen	4 Dukumen	66,405,800	66,405,800	16,732,400	Kat. Beking Trans. Sekt. Swasta	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	4 Dukumen	66,405,800	Daerah
3 01 02 201 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan (Sama dan Berbeda Industri)	Jumlah Dukungan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan (Sama dan Berbeda Industri)				4 Dukumen	4 Dukumen	18,025,000	18,025,000	11,650,000	Kat. Beking Trans. Sekt. Swasta	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	4 Dukumen	18,025,000	Daerah
3 01 02 201 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan Industri dan Perekonomian Masyarakat	Jumlah Dukungan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan Industri dan Perekonomian Masyarakat				4 Dukumen	4 Dukumen	5,545,833,330	22,115,19,400	2,400,975,000	Kat. Beking Trans. Sekt. Swasta	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	4 Dukumen	5,545,833,330	Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan								Kategori Sifat	Proyeksi Monev Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Duga Indikator			Sumber Dana	Prioritas			Target	Duga Indikator		
						Senada	Merajut	RKPD 2023	APSD 2023	RKPD 2023 Pendekatan		Nasional	Daerah					
		yang terintegrasi dengan Sistem Adipapan Postur dan Struktur Teknologi Sema (Elektronik)									(Senada)							
1.01.04	PROGRAM PENGUJIAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi Industri di SINAS	Persentase	Persentase		38,33 Persen	SR33 Persen	38,815,500	38,815,500	28,755,500				38,33 Persen	102,000,000			
1.01.04.201	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Lokal (RUK, RUKI dan IPIK) Berkeadilan/Kelembagaan/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Domestikasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kelembagaan/Kota Melalui SINAS	Rupiah	Rupiah		25490,2023	25490,2023	25,490,200	25,490,200	28,755,500				25,490,2023	102,000,000			
1.01.04.201.03	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kelembagaan/Kota Melalui SINAS	Jumlah Dokumen Hasil Domestikasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kelembagaan/Kota Melalui SINAS				4 Dokumen	4 Dokumen	300,015,500	300,015,500	28,735,500	Kota Pelayanan Tingkat Lokal Kategori Sangat Berkembang			4 Dokumen	100,000,000	Kota Pelayanan Tingkat Lokal Kategori Sangat Berkembang		
TOTAL								14,509,002,872	14,474,444,296	11,999,998,132					78,116,875,800			



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 518 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan susunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~918~~ TAHUN 2023
TANGGAL : 28 Agustus 2023

**SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023**

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	HASIL VERIFIKASI
1.	Sekretariat Daerah	Sesuai
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sesuai
3.	Inspektorat Daerah	Sesuai
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sesuai
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
8.	Dinas Pendidikan	Sesuai
9.	Dinas Kesehatan	Sesuai
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sesuai
13.	Dinas Perhubungan	Sesuai
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai
15.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai
17.	Dinas Pertanian dan Pangan	Sesuai
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai
19.	Dinas Perikanan	Sesuai
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai
21.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai
22.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sesuai
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sesuai
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sesuai
27.	Kecamatan Manggar	Sesuai
28.	Kecamatan Gantung	Sesuai
29.	Kecamatan Kelapa Kampit	Sesuai
30.	Kecamatan Dendang	Sesuai
31.	Kecamatan Damar	Sesuai
32.	Kecamatan Simpang Renggang	Sesuai
33.	Kecamatan Simpang Pesak	Sesuai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

